

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur kemajuan melalui kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia diharapkan meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat. Kinerja keuangan desa dan alokasi belanja desa memiliki peran signifikan dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tingkat daerah. Kinerja keuangan desa yang baik mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya secara efisien, yang berimplikasi pada peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Menurut Saragih (2019), pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel dapat mempercepat pembangunan manusia di desa, karena alokasi belanja yang tepat sasaran akan meningkatkan akses terhadap pelayanan publik. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Rohman (2021) menunjukkan bahwa belanja desa yang difokuskan pada pembangunan sosial dan ekonomi berkontribusi langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, terutama melalui perbaikan dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Suharto (2018), yang menekankan bahwa investasi pada belanja infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah indeks komposit (gabungan) dari indeks pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang diharapkan dapat mengukur keberhasilan pembangunan manusia yang tercermin dengan penduduk yang berpendidikan, sehat dan berumur panjang, berketrampilan serta mempunyai pendapatan untuk layak hidup (Badan Pusat Statistik, 2015).

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di dalam negeri seperti eksklusi perempuan, etnis minoritas dan penduduk terpencil menghambat kemajuan pembangunan manusia, yang menyebabkan penurunan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia di tingkat global (UNDP,2017). BPS mengubah metode perhitungan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2015. Metode baru mengubah perhitungan metode agregasi dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Selain itu, angka melek huruf dari metode lama diganti dengan angka harapan sekolah lama, dan metode lama mengubah Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita menjadi Produk Nasional Bruto (PNB). Untuk mendapatkan gambaran yang lebih relevan tentang pendidikan dan perubahan yang terjadi, masukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan. PDB digantikan oleh PNB karena lebih fokus pada pembangunan manusia. Hal ini mencerminkan kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam hal harapan hidup saat lahir, rata-rata tahun bersekolah, harapan lama bersekolah dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita selama periode tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia dalam tingkat nasional dan provinsi cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2021-2023 sebagaimana dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021-2023

Wilayah	2021	2022	2023
Sumba Barat	63,83	64,43	65,22
Sumba Timur	65,74	66,17	67,05
Kupang	64,41	65,04	65,82
Timor Tengah Selatan	62,16	62,73	63,58
Timor Tengah Utara	63,69	64,26	65,16
Belu	62,77	63,22	63,83
Alor	61,37	62,26	62,99
Lembata	64,75	65,47	66,12
Flores Timur	64,22	64,93	65,79
Sikka	65,41	66,06	66,89
Ende	67,30	67,97	68,63
Ngada	67,88	68,26	69,14
Manggarai	65,01	65,83	66,42
Rote Ndao	62,60	63,21	64,00
Manggarai Barat	64,17	64,92	65,81
Sumba Tengah	61,80	62,71	63,48
Sumba Barat Daya	62,29	63,15	63,74
Nagekeo	65,82	66,22	67,07
Manggarai Timur	61,37	62,30	63,24
Sabu Raijua	57,03	57,90	58,89
Malaka	60,42	61,34	62,06
Kota Kupang	79,74	80,20	80,62
Nusa Tenggara Timur	65,28	65,90	66,68

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Tabel 1.1 menampilkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada periode 2021 hingga 2023. Secara umum, wilayah-wilayah di NTT mengalami peningkatan IPM setiap tahunnya, meskipun ada beberapa variasi antar daerah. Kota Kupang memiliki Indeks Pembangunan Manusia tertinggi, meningkat dari 79,74 pada 2021 menjadi 80,62 pada 2023, menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Ngada juga menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia yang relatif tinggi, naik dari 67,88 pada 2021 menjadi 69,14 pada 2023. Sebaliknya, Sabu Raijua memiliki Indeks Pembangunan Manusia

terendah, meskipun ada peningkatan dari 57,03 pada 2021 menjadi 58,89 pada 2023.

Wilayah seperti Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan Rote Ndao juga mengalami peningkatan bertahap dalam Indeks Pembangunan Manusia mereka. Sumba Timur dan Sikka termasuk wilayah yang mencatatkan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia yang cukup signifikan, dimana Sikka meningkat dari 65,41 pada 2021 menjadi 66,89 pada 2023.

Provinsi NTT secara keseluruhan mencatat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari 65,28 pada 2021 menjadi 66,68 pada 2023, mencerminkan adanya upaya pembangunan yang berkelanjutan di berbagai sektor di provinsi NTT. Data tabel 1.1 menunjukkan kemajuan sosial dan ekonomi di wilayah-wilayah NTT meskipun masih ada tantangan dalam mencapai pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Menurut Kuncoro (2004), peningkatan perhatian terhadap desentralisasi disebabkan oleh fakta bahwa tidak ada perencanaan terpusat yang efektif dan strategi pertumbuhan dengan pemerataan juga dikenal sebagai pertumbuhan dengan pemerataan telah menjadi populer. Selain itu, ada kesadaran bahwa pembangunan adalah proses yang kompleks dan tidak menentu yang tidak dapat dengan mudah diatur dan direncanakan dari pusat (Kuncoro, 2004). Oleh karena itu, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang tepat, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur. Banyak penelitian menganalisis tingkat keberhasilan pembangunan daerah melalui berbagai

indikatornya, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

Desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan daerah. Pemerintah daerah (pemerintah lokal) akan lebih efisien dalam memproduksi dan menyediakan barang publik, sehingga desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial (sosial welfare), menurut Oates (1993). Dengan menggunakan pendapatan daerah, khususnya PAD, rasio derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, dan kemandirian keuangan daerah adalah pengukuran kinerja keuangan daerah. Besarnya rasio derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, dan kecilnya rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan bahwa suatu daerah dapat menggunakan PAD sebagai sumber pendanaan utama untuk memenuhi kebutuhan belanjanya. Menurut Halim (2007), PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan pusat. Menurut Muluk (2005), desentralisasi fiskal pada dasarnya berkaitan dengan dua hal utama. Pertama, daerah bebas untuk memutuskan berapa banyak yang akan digunakan untuk menyelenggarakan layanan publik dan pembangunan. Kedua, daerah juga bebas untuk memperoleh pendapatan untuk membiayai pengeluaran tersebut. Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang

telah ditetapkan dan dilaksanakan adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah (Halim 2007;231).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, keuangan desa mencakup semua barang dan uang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Anggaran Pengeluaran Belanja Desa (APBDes) berfungsi sebagai dasar untuk pengelola keuangan desa selama satu tahun anggaran. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa yang diperoleh dari Pendapatan Asli Desa (PAD) itu sendiri, dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Bagi Hasil (PBH) yang diperoleh dari retribusi pajak, dan Bantuan Pendapatan dari Kabupaten dan Provinsi. Ada prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam pengelolaan keuangan, termasuk transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Belanja desa diklasifikasikan menjadi empat bidang yaitu belanja desa di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, belanja desa bidang pelaksanaan pembangunan desa, belanja desa bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat desa. Sementara itu, pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Batafor (2011) melakukan penelitian untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat dan kinerja keuangan di Kabupaten Lembata, Provinsi NTT. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan meningkatkan kinerja keuangan desa, yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, rasio efisiensi,

dan rasio keserasian belanja, terjadi peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia menjadi semakin menarik dan penting untuk diteliti karena ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu. Peneliti termotivasi untuk melakukannya lagi, terutama tentang komponen yang diduga berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten dan kota di Provinsi NTT. Salah satunya adalah kinerja keuangan daerah. Ada keyakinan bahwa kinerja keuangan daerah tidak serta merta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, tetapi mungkin ada dampak dari variabel belanja modal yang mempengaruhi kinerja keuangan.

Belanja desa sangat penting karena berperan langsung dalam proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel atas pendapatan dan belanja desa juga penting untuk memastikan bahwa dana yang ada benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Belanja Desa kabupaten/kota di Provinsi NTT selama tahun 2021-2023 dapat dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
Belanja Desa di Kabupaten Kota Se-Provinsi NTT
2021-2023

Wilayah	BELANJA DESA		
	2021	2022	2023
Sumba Barat	133.224.207	93.421.641	97.114.463
Sumba Timur	177.214.167	93.421.641	97.114.463
Kupang	190.858.570	184.874.224	166.670.738
Timor Tengah Selatan	298.250.968	275.025.408	298.373.966
Timor tengah Utara	115.220.589	-	-
Belu	103.882.599	92.408.932	98.603.095
Alor	185.140.349	178.806.787	162.709.051
Lembata	158.204.858	132.554.411	154.133.655
Flores Timur	210.511.807	183.667.330	235.528.447
Sikka	177.180.216	172.614.801	182.907.828
Ende	191.102.322	186.754.341	221.601.565
Ngada	185.563.463	117.426.748	137.963.493
Manggarai	117.382.321	103.303.479	138.687.266
Rote Ndao	105.846.797	120.480.472	139.314.130
Manggarai Barat	174.207.883	143.970.080	93.082.909
Sumba Tengah	112.653.871	72.811.830	92.690.008
Sumba Barat Daya	174.704.020	161.408.681	219.912.063
Nagekeo	122.392.498	92.832.691	103.928.923
Manggarai Timur	190.509.668	149.322.506	133.758.116
Sabu Raijua	99.756.499	-	-
Malaka	94.801.511	113.132.368	147.636.695

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Data mengenai belanja desa di Kabupaten Kota se-Provinsi NTT menunjukkan adanya peningkatan disetiap tahunnya. Pada tahun 2021 belanja yang mengalami peningkatan pada Kabupaten Timor Tengah Selatan dan belanja desa di tahun 2021 yang paling menurun itu pada Kabupaten Malaka. Pada tahun 2022 belanja desa di kabupaten Timor Tengah Selatan mengalami penurunan menjadi 275.025.408.

Pada tahun 2022 dan 2023, alokasi belanja desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Sabu Raijua tidak memenuhi jumlah sampel minimum yang

disyaratkan untuk dijadikan bahan analisis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini mungkin disebabkan oleh kendala dalam pengumpulan data di lapangan, seperti keterbatasan akses ke wilayah-wilayah tertentu atau kurangnya pencatatan administrasi keuangan desa yang akurat. Desa-desanya di kabupaten tersebut mungkin menghadapi kesulitan dalam pelaporan atau penyusunan laporan keuangan desa secara tepat waktu, yang mengakibatkan data yang tersedia tidak mencukupi untuk dijadikan sampel representatif bagi studi yang lebih mendalam.

Ketidakmampuan untuk memenuhi sampel minimum juga bisa dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas desa dalam pengelolaan anggaran. Di beberapa desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Sabu Raijua, kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola anggaran dan menyusun laporan keuangan masih terbatas. Hal ini menyebabkan belanja desa yang dilakukan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga mengurangi validitas data yang dapat diambil oleh BPS. Tantangan ini sering kali terkait dengan ketersediaan teknologi, pendidikan, dan pelatihan bagi perangkat desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Menurut data BPS (2022), jumlah desa yang menjadi responden dalam studi keuangan desa di dua kabupaten tersebut belum cukup untuk memenuhi standar analisis statistik. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam pemetaan dan analisis belanja desa di wilayah tersebut, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi pemahaman yang lebih luas tentang efektivitas alokasi belanja desa dalam mendukung pembangunan di daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan

keuangan desa di kedua kabupaten tersebut agar data yang diperoleh lebih akurat dan dapat diandalkan.

Belanja desa di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT meningkat, sedangkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di NTT tetap lambat. Ini menunjukkan kemungkinan Dana Desa belum efektif mendorong pembangunan manusia. Penggunaan dana yang tidak tepat sasaran atau kurangnya prioritas pada sektor pendidikan dan kesehatan mungkin menjadi penyebab utama lambatnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Fahrurrozi et al., 2023). Selain itu, Kendala efektivitas kinerja keuangan desa adalah rendahnya kapasitas aparatur, kurangnya program prioritas berbasis kebutuhan, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas, menghambat dampak Dana Desa pada kesejahteraan masyarakat (Nuryadi et al., 2023).

Dalam konteks pembangunan manusia, belanja desa harus diarahkan pada sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan dimensi Indeks Pembangunan Manusia, seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Misalnya, anggaran untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, peningkatan akses air bersih, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita desa (Nuryadi et al., 2023). Investasi pada sektor-sektor ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan IPM di Provinsi NTT.

Kondisi geografis NTT yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan wilayah-wilayah terpencil juga menjadi salah satu tantangan dalam peningkatan pembangunan manusia. Akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, sering kali terbatas, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Oleh karena

itu, alokasi anggaran desa harus mempertimbangkan upaya untuk memperbaiki akses tersebut.

Selain itu, dalam memaksimalkan potensi pembangunan desa, pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran, serta pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah dan pusat (Rahman Halim et al., 2023). Dengan demikian, program-program yang direncanakan oleh desa dapat benar-benar berdampak pada masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, yang pada akhirnya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan desa dan pemanfaatan Belanja Desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi NTT. Meskipun alokasi Dana Desa terus meningkat, tantangan dalam pengelolaan dana, seperti rendahnya kapasitas pengelolaan dan minimnya akuntabilitas, masih menjadi hambatan utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Upaya kolaboratif antara pemerintah desa, pemerintah daerah, serta masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa Dana Desa dikelola dengan baik dan diarahkan pada sektor-sektor yang dapat mempercepat peningkatan IPM di Provinsi NTT.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Artha et al (2021) dengan judul Pengaruh Dana Desa Terhadap Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia Wilayah desa Kota di Indonesia menunjukkan bahwa program dana desa berpengaruh negatif terhadap kesenjangan indeks pembangunan manusia. Riset Almaas (2022) dengan judul Pengaruh Alokasi Dana Desa, Pengeluaran

Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur menemukan bahwa alokasi dana desa dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan Teori Latar Belakang permasalahan dengan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan pada latar belakang penulisan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kinerja Belanja Desa Sebagai Determinan Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Se-Provinsi NTT”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa, belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa, belanja bidang pembinaan kemasyarakatan, belanja pemberdayaan masyarakat desa dan indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)?
2. Apakah belanja desa di bidang penyelenggaraan pemerintah desa berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia ?
3. Apakah belanja desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia ?
4. Apakah belanja desa di bidang pembinaan kemasyarakatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia ?

5. Apakah belanja desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia ?
6. Apakah belanja desa di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, belanja desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa, belanja desa di bidang pembinaan kemasyarakatan, dan belanja desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa, belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa, belanja bidang pembinaan kemasyarakatan, belanja pemberdayaan masyarakat desa dan indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
2. Untuk mengetahui belanja desa di bidang penyelenggaraan pemerintah desa berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3. Untuk mengetahui belanja desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
4. Untuk mengetahui belanja desa di bidang pembinaan kemasyarakatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
5. Untuk belanja desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

6. Untuk mengetahui belanja desa di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, belanja desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa, belanja desa di bidang pembinaan kemasyarakatan, dan belanja desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah memahami bagaimana kinerja keuangan desa dan Belanja Desa mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan desa agar lebih tepat sasaran.

2. Bagi Institusi Terkait

Institusi terkait, seperti lembaga pengelola keuangan dan pembangunan desa, dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan Belanja Desa, memperbaiki perencanaan, dan meningkatkan akuntabilitas.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan desa yang baik dan manfaat Belanja Desa dalam meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong partisipasi aktif dalam program pembangunan.

4. Bagi Peneliti Lainnya

Penelitian ini menyediakan data dan analisis yang dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai hubungan antara kinerja keuangan desa, Belanja Desa, dan pembangunan manusia, khususnya di wilayah NTT.